

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan peristiwa yang disebabkan oleh alam, non-alam, dan manusia, serta dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan diantaranya korban jiwa, gangguan trauma psikologis, terganggunya kegiatan di bidang ekonomi, hingga kerusakan berat pada lingkungan.¹ Kombinasi dari faktor alam dan kondisi lingkungan menjadi faktor penyebab rangkaian peristiwa dan menjadikan suatu daerah rawan akan bencana alam. Bencana alam yang rawan merupakan tantangan bagi daerah yang terkhususnya Provinsi Sumatera Barat.

Tingginya tingkat kerawanan bencana semakin terlihat pada bencana Tahun 2024. Sumatera Barat mengalami serangkaian bencana alam yang berdampak luas. Bencana alam tanah longsor dan banjir bandang lahar dingin menjadi peristiwa bencana yang kompleks dan saling berkaitan. Dampak dari bencana tersebut sangat besar, baik dalam hal korban jiwa, ekonomi, infrastruktur, maupun kehidupan sosial masyarakat. Selain menghancurkan fisik wilayah, juga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi warga. Berikut data dampak bencana alam tanah longsor dan banjir bandang lahar dingin di Provinsi Sumatera Barat:

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana>

Tabel 1. 1
Dampak Bencana Alam Tanah Longsor dan Banjir Bandang Lahar Dingin
Sumatera Barat 11-12 Mei 2024

No.	Daerah terdampak	Jumlah Korban		Jumlah Kerusakan	Total Kerugian
		Pengungsi	Meninggal Dunia		
1.	Kabupaten Agam (12 dari 16 Kecamatan)	704 Jiwa	24 Orang	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 titik jalan rusak ● 16 unit jalan jembatan ● 39 unit irigasi ● 4 unit tempat ibadah ● 3 unit fasilitas pendidikan ● 1 unit fasilitas kesehatan ● 317 unit rumah rumah rusak ● 31 unit rumah hanyut ● 122 unit sarana perdagangan ● 345,27 Ha lahan pertanian 	± 197.610.497.533
2.	Kabupaten Tanah Datar (6 dari 14 Kecamatan)	2.885 Jiwa	32 Orang	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 titik jalan putus total ● 36 unit jembatan ● 1131 unit irigasi ● 18 unit tempat ibadah ● 4 fasilitas pendidikan ● 1 fasilitas kesehatan ● 210 unit rumah rusak ● 43 unit rumah hanyut 	± 259.81.663.000

				<ul style="list-style-type: none"> ● 87 unit sarana perdagangan ● 412,511 Ha lahan pertanian ● 81,64 Ha lahan perkebunan 	
3.	Kota Padang Panjang (1 dari 2 Kecamatan)	53 Jiwa	2 Orang	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 ruas jalan ● 2 unit jembatan ● 11 unit irigasi ● 1 unit tempat ibadah ● 16 unit rumah ● 21,14 Ha lahan pertanian 	± 29. 339.205.503

Sumber: Laporan Grafik Dampak Bencana Tanah Longsor Banjir Bandang Lahar Dingin dari BPBD Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian diolah oleh peneliti Tahun 2025

Tabel 1.1 merupakan data rekapitulasi dampak bencana alam tanah longsor dan banjir bandang lahar dingin pada Tahun 2024. Dampak yang dirasakan cukup signifikan terhadap beberapa daerah di Sumatera Barat, diantaranya Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Ketiga daerah tersebut mengalami kerusakan infrastruktur dan adanya korban jiwa, namun terdapat perbedaan dalam skala dampak, karakteristik wilayah, serta kompleksitas penanggulangan. Sehingga hal ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana oleh pemerintah kabupaten/kota di lapangan.

Berdasarkan skala dampak, karakteristik wilayah terdampak, serta kompleksitas penanggulangan menunjukkan perbedaan yang mencolok. Kabupaten Tanah Datar mencatat korban jiwa tertinggi, yakni 32 orang, diikuti oleh Kabupaten Agam sebanyak 24 orang, dan Kota Padang Panjang 2 orang. Namun demikian,

Kabupaten Agam merupakan wilayah yang paling luas terdampak, yakni 12 dari 16 kecamatan, dengan jenis bencana yang kompleks meliputi tanah longsor dan banjir bandang lahar dingin. Dibandingkan Tanah Datar yang terdampak yakni 6 kecamatan dan Padang Panjang hanya 1 kecamatan.

Kabupaten Agam menghadapi tantangan yang lebih besar baik dari sisi geografis, cakupan dampak, maupun beban koordinasi lintas sektor dalam proses penanggulangan. Wilayah Kabupaten Agam memiliki karakteristik geografis yang kompleks, karena terdiri dari daerah pegunungan, perbukitan, serta aliran sungai yang rawan bencana.² Semakin luas wilayah suatu daerah, maka semakin luas daerah terdampak bencana.³ Persebaran penduduk di berbagai nagari dengan topografi yang bervariasi menjadi tantangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan pasca-bencana.

Kajian akademik yang secara spesifik membahas pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Agam dalam membedah bagaimana pemerintah daerah menjalankan tahapan pra, saat, dan pascabencana secara sistematis, masih sangat terbatas. Penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Agam sebagai upaya untuk mengisi celah kajian dan memberikan kontribusi dalam memahami tata kelola penanggulangan bencana di tingkat daerah secara lebih komprehensif. Berdasarkan konteks inilah penting untuk mengkaji bagaimana Pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam

² Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Agam Tahun 2022-2026. hlm. 1-2

³ *Ibid.* Hlm 4

penanggulangan bencana alam sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta regulasi turunannya.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 5, mengamanatkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya berkewajiban dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.⁴ Selaras dengan hal tersebut, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 18, menegaskan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya serta kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya, termasuk urusan penanggulangan bencana.⁵

Berangkat dari pembahasan sebelumnya, meskipun bencana alam tanah longsor banjir lahar dingin berskala provinsi, namun dalam pelaksanaan peran dari pemerintah provinsi adalah sebagai pendamping dan memberikan bantuan materiil/non-materiil, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memegang peran utama dalam pengambilan langkah cepat serta dalam menangani dampak di wilayah masing-masing. Aktor utama pelaksanaan penanggulangan bencana alam di lapangan adalah pemerintah kabupaten/kota yaitu melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Budi Perwira Negara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam menyampaikan:⁶

⁴ Undang-Undang Nomor 24 BAB III Pasal 5 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Penanggulangan Bencana.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Pasal 18 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁶ Wawancara dengan Budi Perwira Negara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam, 05 Maret 2025, di Kantor BPBD Kabupaten Agam, Kecamatan Lubuk Basung.

“...bencana tanah longsor banjir bandang lahar dingin kala itu memang berdampak tidak hanya di daerah Agam saja, tapi daerah lain seperti Tanah Datar dan Padang Panjang juga terdampak. Penanggulangan bencana yang terjadi tetap berada pada kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing daerah. Tapi karena dampak dari bencana cukup besar tentu adanya bantuan yang diberikan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat seperti bantuan dan pendampingan. Namun untuk tanggung jawab pelaksanaan di lapangan dalam penanggulangan bencana ini tetap oleh pemerintah kabupaten/kota”

Sejalan dengan itu, Acil Albara Kepala Seksi Darurat BPBD Provinsi

Sumatera Barat juga menyampaikan:⁷

“...dampak kerusakan yang luas tentu penanganan juga luas dengan memperhatikan prioritas, selain itu tentu adanya keterbatasan anggaran dan personil di daerah yang terdampak, sehingga pemerintah pusat maupun provinsi itu bersifat mendampingi dan membantu. Karena ini kan otonomi daerah, dan saat itu pusat juga memberikan bantuan. Begitu juga provinsi yakni pendampingan dan membantu. Arti kata dalam penanggulangan bencana ini memang melibatkan banyak pihak, tapi untuk tanggung jawab pelaksanaannya tentu menjadi tanggung jawab dari daerah masing-masing.”

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam dan Kepala Seksi Darurat BPBD Provinsi Sumatera Barat, bencana tanah longsor banjir bandang lahar dingin yang terjadi pada Tahun 2024 termasuk kategori bencana berskala provinsi, dan tanggung jawab pelaksanaan di lapangan merupakan tanggung jawab masing-masing daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Pemerintah daerah melalui BPBD memiliki peran dan tanggung jawab penting pada tiga tahapan penanggulangan bencana. Berdasarkan Perda Kabupaten Agam No. 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan tanggung

⁷ Wawancara dengan Acil Albara Kepala Seksi Darurat BPBD Provinsi Sumatera Barat, 18 Maret 2025, di Kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang.

jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dilaksanakan dan dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi BPBD.⁸ BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam adalah sebagai pengarah dan pelaksana penanggulangan bencana.⁹ BPBD berperan sebagai *leading sector* yakni memiliki fungsi koordinasi, pelaksana, dan komando.¹⁰

Berdasarkan peraturan perundangan pelaksanaan penanggulangan bencana, peran Pemerintah Kabupaten Agam tidak hanya melibatkan BPBD, tetapi juga berbagai SKPD lainnya, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran. Masing-masing instansi memiliki tanggung jawab sesuai dengan bidangnya, namun semuanya harus berkoordinasi untuk memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien serta tidak tumpang tindih.

Konsep pelaksanaan dalam penanggulangan bencana alam mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan semua tahapan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan efektif di lapangan. SKPD memiliki peran spesifik dalam menangani bencana alam sesuai bidang masing-masing. Untuk membantu penyusunan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5 Ayat (2)

⁹ Undang-Undang Nomor 24 Pasal 19 Tahun 2007 Tentang BPBD

¹⁰ Postkotantb.Com. 2022. "BPBD Merupakan Leading Sektor Penanggulangan Bencana di Tingkat Daerah" Dilansir Dari <https://www.postkotantb.com/2022/07/bpbd-merupakan-leading-sektor.html> Diakses Pada 06 Desember 2024

yang digunakan peneliti sebagai bahan rujukan dan pembeda berdasarkan fokus kajian penelitian.

Pertama, penelitian mengenai peran pemerintah daerah. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api di Karangetang Kabupaten Kepulauan Biaro,¹¹ Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana,¹² dan Peran Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bandung.¹³ Fokus tiga penelitian tersebut adalah bagaimana pemerintah daerah berperan dalam penanggulangan bencana alam dan peran BPBD dalam membentuk sinergitas pemerintah daerah pada aspek pengoptimalan tahapan penanggulangan bencana.

Fokus kajian penelitian kedua, penelitian mengenai strategi dalam penanggulangan bencana alam. Aksi dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi Bencana,¹⁴ Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Penanggulangan Bencana Longsor di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat,¹⁵ dan Strategi Pengurangan Risiko Bencana Gerakan Tanah Melalui Pendidikan dan

¹¹ Wilade, J. I., Pangemanan, S., & Sumampouw, I. 2019. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

¹² Heryati, S. 2020. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 139-146.

¹³ Permana, D. 2023. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21 (2), 156-165.

¹⁴ Rengganis, A. 2020. Aksi Dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi Bencana. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 14(01), 1-8

¹⁵ Nisbi, H., & Rohmadin, S. 2024. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Penanggulangan Bencana Longsor di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (*Doctoral Dissertation, IPDN*).

Pelatihan Tentang Kebencanaan Bagi Masyarakat.¹⁶ Fokus ketiga penelitian tersebut mengkaji aksi dan strategi yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana yang efektif dan tepat.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, pelaksanaan penanggulangan bencana masih menunjukkan faktor penghambat seperti adanya kendala dalam bentuk anggaran, sarana prasarana, alokasi sumber daya manusia, keterbatasan pelatihan dan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait, serta peran koordinasi antar sektor yang belum optimal. Faktor penghambat tersebut selalu menjadi hambatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Penelitian terdahulu berfokus membahas keberadaan lembaga dan sumber daya dalam penanggulangan bencana serta peran pemerintah daerah yang lebih umum dan peran dari BPBD tanpa fokus khusus terhadap pelaksanaan peran dari masing-masing SKPD dalam penanggulangan bencana alam, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kajian pada pelaksanaan penanggulangan bencana alam tanah longsor dan banjir bandang lahar dingin Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Agam dengan fokus terhadap pelaksanaan peran dari masing-masing perangkat daerah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan di tingkat lokal khususnya Kabupaten Agam, karena merupakan daerah yang memiliki risiko bencana yang tinggi dan

¹⁶ Rohaendi, N., Setiawan, I. F., Suwargana, H., & Herlinawati, H. 2023. Strategi Pengurangan Risiko Bencana Gerakan Tanah Melalui Pendidikan dan Pelatihan Tentang Kebencanaan Bagi Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 2337-2348.

menjadi salah satu daerah terdampak bencana alam tanah longsor dan banjir bandang lahar dingin pada tahun 2024. Berdasarkan kondisi geografis dan iklim, Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah tingkat rawan bencana alam tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Jenis bencana alam yang terjadi diantaranya gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, lahar dingin, erupsi gunung marapi, serta angin puting beliung.¹⁷ Sehingga dalam hal ini Kabupaten Agam harus memiliki sistem penanggulangan bencana alam yang efektif dan tepat.

Penelitian pelaksanaan penanggulangan bencana alam oleh Pemerintah Kabupaten Agam bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh melalui SKPD terkait di setiap tahapan penanggulangan bencana. Tujuan lainnya adalah memberikan rekomendasi terhadap sistem manajemen bencana terkhususnya dalam konteks desentralisasi dan pelaksanaan peran pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi bencana. Hasil penelitian ini dapat memberikan pembaruan dalam studi mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Selama beberapa tahun terakhir intensitas bencana alam cukup tinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat, seperti gempa bumi, letusan gunung marapi, banjir, banjir bandang, serta tanah longsor. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2022 tercatat kasus bencana di Provinsi Sumatera Barat yakni 1.021 bencana.¹⁸ Pada rentang tahun 2022 hingga tahun 2023 tercatat kasus bencana sebanyak 1.576 bencana, dan tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai status darurat

¹⁷ Laporan Rekapitulasi Bencana Alam di Kabupaten Agam Tahun 2022 – 2024.

¹⁸ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2022. Data dan Informasi Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Yusra, Et Al.

bencana, dan salah satunya termasuk daerah Kabupaten Agam.¹⁹ Secara geografis dan geologis wilayah Kabupaten Agam merupakan daerah dengan potensi rawan bencana alam tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Merujuk pada hal tersebut, Ichwan, Kepala Bidang BPBD Kabupaten Agam:²⁰

“Berdasarkan letak dan kondisi secara geografis, wilayah agam adalah tempat semua bencana terjadi atau sering disebut marketnya bencana. Bencana yang terjadi ada gempa, banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan amblas, angin kencang, gunung meletus, dan abrasi. Bencana ini tidak hanya terjadi di satu kecamatan melainkan di semua kecamatan memiliki tipe serta kerawanan bencana alam yang berbeda-beda. Selain itu, Agam menjadi salah satu daerah rawan akan potensi bencana alam di setiap tahunnya bahkan hampir di setiap bulan di Sumatera Barat”

Berikut uraian peristiwa bencana alam yang terjadi di Kabupaten Agam pada tahun 2022-2024:

Tabel 1.2
Data Bencana Alam Kabupaten Agam Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	Bencana alam	Jumlah kasus		
			2022	2023	2024
1.	Banuhampu	Banjir	0	0	5
		Banjir Bandang dan Tanah Longsor	0	0	1
		Tanah Longsor	1	0	1
		Tebing Longsor	0	0	1
2.	IV Koto	Banjir	0	1	3
		Banjir Bandang dan Tanah Longsor	0	0	3
		Gempa Bumi	0	1	0
		Jalan Amblas	0	3	1
		Jalan terkikis air bah	0	1	0
		Jembatan Amblas	0	0	1
		Tanah Longsor	3	11	17
3.	Tanjung Raya	Banjir	4	4	2

¹⁹ Sumbar.Antarnews.Com. 2024. “Sepanjang 2023 Terjadi 555 Kejadian Bencana Di Sumbar”. Dilansir Dari <https://sumbar.antarnews.com/Berita/595668/Sepanjang-2023-Terjadi-555-Kejadian-Bencana-Di-Sumbar#:~:Text=Sepanjang%202023%20terjadi%20555%20kejadian,Berita%20Terkini%20Pada%20Sumatera%20Barat>. Diakses Pada 23 Agustus 2024

²⁰ Wawancara Dengan Ichwan, Kepala Bidang BPBD Kabupaten Agam, 30 Desember 2024, di Kantor BPBD Kabupaten Agam, Kecamatan Lubuk Basung.

		Banjir Bandang	0	11	1
		Banjir Bandang dan Tanah Longsor	0	0	1
		Bahu Jalan Amblas	0	1	0
		Bahu Jalan Terban	0	1	0
		Kebakaran Lahan	0	0	1
		Tanah Longsor	9	20	6
4.	Ampek Nagari	Angin Kencang	0	0	1
		Banjir	3	4	3
		Jalan Amblas	2	0	0
		Tanah Longsor	4	5	2
5.	Tanjung Mutiara	Abrasi Pantai	0	2	0
		Angin Kencang	0	3	0
		Banjir	1	0	7
		Jalan Amblas	1	0	1
6.	Lubuk Basung	Tanah Longsor	1	0	1
		Angin Kencang	2	6	1
		Banjir	1	0	3
		Jalan Amblas	0	2	1
		Tanah Longsor	4	0	1
7.	Matur	Tebing Runtuh	1	0	0
		Bahu Jalan Terban	1	0	0
		Jalan Amblas	0	1	1
		Tanah Longsor	8	9	9
8.	Tilatang Kamang	Angin Puting Beliung	1	0	0
		Bahu Jalan Terban	0	0	1
		Bahu Sungai Terban	0	0	1
		Banjir	0	1	1
		Banjir Bandang dan Tanah Longsor	0	0	1
		Tanah Amblas	0	1	2
		Tanah Longsor	1	2	3
9.	Baso	Tanggul Batang Agam Jebol	0	1	0
		Abrasi Sungai	0	0	1
		Bahu Jalan Terban	0	0	1
		Banjir	0	0	1
		Jalan Amblas	0	1	5
		Jalan Retak	0	1	0
		Kebakaran Lahan	1	1	0
Tanah Longsor	1	10	16		
10.	Palupuh	Banjir	0	3	0
		Jalan Amblas	1	3	0
		Tanah Longsor	13	22	18
11.	Sungai Pua	Angin Kencang	0	2	0
		Banjir	1	0	1
		Banjir Bandang dan Tanah Longsor	0	0	1

		Banjir Bandang Lahar Dingin	0	0	1
		Erupsi Gunung Marapi	0	2	3
		Tanah Longsor	1	0	3
		Angin Kencang	0	0	1
		Banda Amblas	0	1	0
		Banjir	1	0	1
		Banjir Bandang dan Tanah Longsor	0	0	1
12.	Canduang	Banjir Bandang Lahar Dingin	0	0	2
		Bendungan Irigasi Jebol	1	0	0
		Jalan Amblas	0	0	1
		Jembatan Amblas	0	0	1
		Tanah Longsor	2	3	2
		Angin Kencang	0	0	1
		Banjir	1	0	1
13.	Ampek Angkek	Banjir Bandang dan Tanah Longsor	0	0	1
		Banjir Bandang Lahar Dingin	0	0	1
		Tanah Longsor	0	0	1
14.	Malalak	Bahu Jalan Terban	1	0	0
		Jalan Amblas	0	1	1
		Tanah Longsor	9	8	4
		Banjir	1	0	3
		Banjir Bandang	0	1	0
		Gempa Bumi	1	0	0
		Irigasi Amblas	0	0	1
		Jalan Amblas	3	0	4
		Kebakaran Lahan	0	0	1
15.	Palembayan	Learning Saluran Irigasi Patah	0	1	0
		Luapan Air Sungai Batang Anggang	0	1	1
		Runtuhan Batu Tebing	0	1	0
		Tanah Amblas	1	0	0
		Tanah Longsor	5	14	11
		Angin Kencang	1	0	0
16.	Kamang Magek	Banjir Bandang dan Tanah Longsor	0	0	1
		Tanah Longsor	0	0	1
		Jumlah	99	175	177

Sumber: Laporan Rekapitulasi Bencana Alam dari BPBD Kabupaten Agam yang kemudian diolah oleh peneliti Tahun 2024

Tabel 1.2 menunjukkan adanya peningkatan dan perbedaan tingkat kerawanan bencana alam di Kabupaten Agam tahun 2022-2024. Tahun 2024 wilayah Kabupaten Agam mengalami peningkatan kasus bencana alam semenjak terjadinya erupsi Gunung Marapi, bahkan menjadi kasus bencana yang kompleks dan berdampak luas. Tingginya intensitas hujan menjadi penyebab utama kondisi tersebut, sedangkan kapasitas sungai dan drainase yang terbatas tidak dapat menampung debit air dan material lahar dingin. Sehingga terjadinya rentetan bencana alam, yakni banjir bandang yang disertai tanah longsor dan lahar dingin sehingga berdampak ke perekonomian masyarakat, rusaknya lingkungan, hingga menimbulkan banyaknya korban jiwa dan pengungsi.²¹

Tabel 1.3
Nagari yang terdampak Bencana Alam Pada Bulan Mei 2024

No.	Kecamatan	Nagari
1.	IV Koto	<ul style="list-style-type: none"> ● Koto Tuo ● Balingka ● Koto Gadang
2.	Canduang	<ul style="list-style-type: none"> ● Bukik Batabuah ● Lasi
3.	Sungai Pua	<ul style="list-style-type: none"> ● Sungai Pua ● Batagak ● Batu Palano
4.	Ampek Angkek	<ul style="list-style-type: none"> ● Batu Taba ● Balai Gurah ● Panampuang
5.	Baso	<ul style="list-style-type: none"> ● Padang Tarok ● Koto Tinggi ● Simarasok ● Tabek Panjang ● Cubadak
6.	Banuhampu	<ul style="list-style-type: none"> ● Cingkariang
7.	Malalak	<ul style="list-style-type: none"> ● Malalak Timur
8.	Palembayan	<ul style="list-style-type: none"> ● Ampek Koto Palembayan

²¹ Laporan Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Agam Tanggal 12 Mei S.D 8 Juni 2024

9.	Tilatang Kamang	<ul style="list-style-type: none"> ● Koto Tengah ● Gadut ● Kapau
10.	Kamang Magek	
11.	Tanjung Raya	<ul style="list-style-type: none"> ● Koto Malintang
12.	Palupuh	<ul style="list-style-type: none"> ● Koto Rantang ● Pasia Laweh ● Nan Tujuh ● Nan Limo ● Pagadih

Sumber: BPBD Kabupaten Agam, 2024

Tabel 1.3 menunjukkan hampir seluruh daerah di Kabupaten Agam terdampak bencana di waktu bersamaan dan menunjukkan bahwa bencana tersebut memberikan dampak yang serius dan luas yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik Gunung Marapi. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 12 Kecamatan, 28 Nagari, dan 11.066 jiwa terdampak, 709 jiwa mengungsi, 22 jiwa luka-luka, dan 24 jiwa meninggal dunia. Selain itu terdapat 316 unit rumah mengalami kerusakan dengan kategori 59 unit rusak berat, 221 unit rusak ringan, dan 36 unit rusak sedang, serta beberapa kerusakan fasilitas yakni 1 fasilitas kesehatan, 3 fasilitas pendidikan, dan 7 unit tempat ibadah. Hal ini juga berdampak ke perekonomian masyarakat yakni \pm 323,65 Ha lahan pertanian rusak, 111 unit tempat usaha rusak, dan \pm 130 ekor hewan ternak.²²

²² Laporan Visual dan Data Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin Kabupaten Agam

Tabel 1.4
Rekapitulasi Kerusakan Rumah Terdampak Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang Lahar Dingin Kabupaten Agam Mei 2024

No.	Kecamatan	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Total
1.	IV Angkek	8	4	96	108
2.	Banuhampu	6	3	30	39
3.	Canduang	22	5	22	49
4.	IV Koto	2	12	53	67
5.	Sungai Pua	21	9	20	50
6.	Malalak	0	3	0	3
Jumlah		59	36	221	316

Sumber: BPBD Kabupaten Agam, 2025

Berdasarkan Tabel 1.4 merupakan data kerusakan rumah dari kecamatan terdampak bencana, sedangkan pada Tabel 1.3 menunjukkan hampir semua kecamatan di Kabupaten Agam terdampak, sehingga dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah Kecamatan Canduang dan Kecamatan Sungai Pua. Dua kecamatan tersebut mengalami tingkat kerusakan berat yang lebih tinggi serta dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Langkah lanjutan yang diambil Bupati Agam adalah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Agam No. 213 Tahun 2024 tentang Penetapan status tanggap darurat bencana alam tanah longsor dan banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Agam. SK tersebut menetapkan bahwa pelaksanaan antisipasi ancaman bencana dilaksanakan oleh perangkat daerah/instansi terkait, yang sesuai tugas pokok dan fungsinya.²³ Sebagai respon terhadap keputusan tersebut, dikeluarkan SK Bupati Agam No. 124 Tahun 2024 tentang pembentukan pos komando tanggap darurat bencana alam tanah longsor dan banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Agam

²³ Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 213 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin di Kabupaten Agam.

dan didalamnya tercantum pembagian peran dari masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.²⁴

Pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, namun fakta yang ditemukan dalam pelaksanaan tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Sebagaimana hal ini terlihat dari terulangnya bencana pada tahun 1979, 2009, dan 2024.²⁵ Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) beberapa bulan sebelum kejadian di bulan Mei telah memperingatkan warga, bahwa material vulkanik telah menumpuk dekat kawah marapi dan bisa memicu potensi terjadinya bencana.

Tabel 1. 5
Tingkat Kerentanan Bencana di Kabupaten Agam

No.	Jenis Bencana	Kelas			Tingkat Kerentanan
		Penduduk Terpapar	Kerugian	Kerusakan Lingkungan	
1.	Banjir	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2.	Banjir Bandang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
3.	Cuaca Ekstrim	Sedang	Tinggi	-	Sedang
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
5.	Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	-	Sedang
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Tinggi	Tinggi	Sedang
7.	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah
8.	Letusan Gunung Marapi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
9.	Letusan Gunung Tandikat	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang

²⁴ Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin di Kabupaten Agam.

²⁵ can.id. 2024. "Ahli soal tewasnya 67 orang pada banjir lahar dingin Sumbar: Jatuhnya korban seharusnya bisa dihindari". Dilansir Dari <https://www.cna.id/indonesia/ahli-soal-tewasnya-67-orang-pada-banjir-lahar-dingin-sumbar-jatuhnya-korban-seharusnya-bisa-dihindari-16296>. Diakses Pada 04 Agustus 2024

10.	Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
11.	Tsunami	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2021, dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Agam 2022-2026

Tabel 1.5 yakni hasil analisa tahun 2021 menunjukkan tingkat kerentanan bencana di Kabupaten Agam tergolong sedang hingga tinggi. Bencana tanah longsor dan banjir bandang menunjukkan risiko kerugian, kerusakan lingkungan, dan kerentanan adalah tinggi. Sementara itu, erupsi Gunung Marapi berada di tingkat sedang. Pada Mei 2024, ketiga bencana tersebut saling berkaitan dan terjadi secara bersamaan, di mana banjir bandang membawa material longsor dan erupsi Gunung Marapi sehingga terjadilah bencana tanah longsor banjir bandang lahar dingin. Berdasarkan tingkat kerentanan yang telah dipetakan, seharusnya Pemerintah Kabupaten Agam dapat mengoptimalkan pelaksanaan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sehingga ketika bencana terjadi dampak dari bencana dapat diminimalisir.

Bencana yang terjadi pada periode 2024 tidak hanya merugikan secara materiil, namun juga memakan banyak korban jiwa. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah adanya fakta bahwa jenis bencana serta dampak yang berulang dan tingkat kerentanan sudah dikaji. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah dengan adanya analisis tingkat kerentanan dan adanya peningkatan dampak semata-mata disebabkan oleh faktor alam atau perilaku masyarakat, atau bahkan hal ini mencerminkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan pasca-bencana. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk menelaah bagaimana pelaksanaan penanggulangan bencana yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, khususnya dalam

menghadapi bencana tanah longsor banjir bandang lahar dingin tahun 2024 melalui berbagai perangkat daerah di setiap fase tahapan yakni prabencana, saat bencana, dan pasca-bencana.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan penanggulangan bencana alam Tanah Longsor dan Banjir Bandang Lahar Dingin Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Agam melalui berbagai perangkat daerah di setiap fase tahapan penanggulangan bencana yakni prabencana, saat bencana, dan pasca-bencana.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menjelaskan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor dan Banjir Bandang Lahar Dingin Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Agam melalui berbagai perangkat daerah di setiap fase tahapan penanggulangan bencana yakni prabencana, saat bencana, dan pasca-bencana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi, serta sebagai bahan referensi. Sehingga penelitian ini dapat membantu pihak yang ingin mengkaji terkait penelitian serupa.